

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Adjie, Habib. *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Andasmita, Komar. *Notaris I*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Febrianty, Yenny. *Keberadaan Hukum Kenotariatan Di Indonesia*. Bekasi: CV. Green Publisher Indonesia, 2023.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Hariyani, Iswi, R. Serfianto Dibyo Purnomo, dan Cita Yustisia Serfiyani. *Panduan Praktis (AHU) Online (Sistem Administrasi Badan Hukum)*. Jakarta Selatan: PT Buku Seru, 2011.
- Hermin. *Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Terhadap Akta Autentik*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2004.
- HR, Ridwan Hukum Administrasi Negara, Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2025

Keluarga Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Gadjah Mada, Modul Tentoran Ujian Masuk Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, KMN FH UGM, 2018

Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1989

Maskun. *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2015

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nurita, R.A. Emma. *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Padjalangi, Andi Rio Idris. *Perlindungan Hukum Notaris*. Renvoi, Edisi No. 11 2006.

M.Hadjon, Philipus, 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Madah University Press, 2008

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Ridwan, Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah, Yogyakarta, FH UII Press, 2014

Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV Mandar Maju, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sumardjono, Maria S.W. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2021.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito, 1994.

Tedjosaputro, Liliana 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, BIGRAF Publishing, 1995

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Widodo. *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Permenkumham 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

- Permenkumham Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan, Persetujuan, Perubahan Anggaran Dasar, dan Berakhirnya Status Badan Hukum
- Permenkumham Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penertiban Surat Keterangan Wasiat
- Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi

C. Artikel Suatu Jurnal

Fariz Van Basten Lumbantobing dan Komang Adi Sastra Wijaya, “Digitalisasi Pelayanan Hukum di Indonesia melalui Website (AHU) Online Sebagai Inovasi Pelayanan Publik pada Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bali”, *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, Vol 3 No.3 2025 ISSN 2988-1293 (online), <https://journals.ldpb.org/index.php/eljbn/article/view/275>

Gabriella Tiku Sarungu dan Disriani Latifah Sorindah, “Dampak Kekeliruan dalam Pemilihan Kode KBLI pada Akta Pendirian PT Bagi Notaris dan Pelaku Usaha”, *UNES LAW REVIEW*, Vol 6, NO.3 (2024), <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1812/1475>

Ayu Maharani Istiqomah dan Marlina Br Purba, “Problematika Hukum Peran Notaris Terhadap Ijin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission”, *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, Vol 21, No.3 (2024), https://repository.ubaya.ac.id/45821/1/Marlina%20br%20Purba_Problematika%20Hukum%20Peran%20Notaris.pdf

Inggou David Purba, “Delik Pidana Akses Ilegal (Hacking) Terhadap Komputer Atau Sistem Elektronik”, *Buletin Of Community Engagement*, Vol.4, No.2 Agustus 2004, <https://attractivejournal.com/index.php/bce/article/view/1408/1089>

Deviany Irwanto “Pertanggungjawaban Notaris Dan Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Akta Terhadap Tindakan Notaris Yang Menggirkan Minuta Akta Untuk Ditandatangani Melalui Biro Jasa (*Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*), Vol 5, No. 5 Mei 2025, <http://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/32165> diakses pada tanggal 14 Juli 2025

Andri Gotama, Ramon Nofrial, Fadlan, Soerya Respationo, Erniyanti, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pejabat umum (*Openbaar Ambtenaar*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terkait Kewenangan Membuat Akta Otentik (Studi Penelitian Di Kota Batam)”, Vol 6 No.1 September 2023, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1172> diakses pada tanggal 1 Agustus 2025

Firman Floranta Adonara, “Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris”, Vol.21 No.1 (2016) Edisi Januari <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/181> diakses pada tanggal 1 Agustus 2025

- Sibuea, Mia Augina Romauli, Rachmi Sulistyarini, Hariyanto Susilo, 2022, “Tanggung Jawab Perdata Notaris Atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Cacat Komparasi”, Jurnal Suara Hukum, Volume 4 Nomor 1 , Maret 2022, https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/15249?utm_source=diakses pada tanggal 7 Agustus 2025
- I Gusti Ayu Suanti Karnadi Singgi, I Gusti Bagus Suryawan, I Nyoman Gede Sugiarta, 2020, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (*CYBER CRIME*)”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, No.2, Oktober 2020, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2553/1863>, diakses pada tanggal 5 November 2025
- Eko Primandana, 2021 “Analisis Penerapan Sistem AHU Online Pada Ditjen AHU, Kemenkumham Republik Indonesia: Suatu Kajian Yuridis Normatif”, Jurnal Meta-Yuridis, Volume 4 Nomor 1 (Maret, 2021)
- I Gede Agus Yudi Suryawan, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Judul: Tanggung Jawab Notaris Menggunakan Layanan Ditjen AHU Online Dalam Hal Pendaftaran Akta Dan Pengesahan Badan Hukum, Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitas, Vol.5 No.3 Desember 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/361844-none-dfe2dfe4.pdf>, diakses pada tanggal 10 November 2025
- Surya, I, Kadek Adi, 2023, “Peranan Notaris Dalam Pengesahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (AHU Online)”, Jurnal Vyavhara Duta Vol XVIII, No.1 , April 2023, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3590258&val=31174&title=PERANAN%20NOTARIS%20DALAM%20PENGESEHAN%20ANGGARAN%20DASAR%20PERSEROAN%20TERBATAS%20MELALUI%20SISTEM%20ADMINISTRASI%20BADAN%20HUKUM%20AHU%20ONLINE> diakses pada tanggal 10 November 2025
- Devin Ignatius Purba, Lexpress: Peraturan Kebijakan Sebagai “Law Of The Game”: Menakar Kekuatan Mengikat Surat Edaran Dalam Sistem Hukum, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/lexpress-peraturan-kebijakan-sebagai-law-of-the-game-menakar-kekuatan-mengikat-surat-edaran-dalam-sistem-hukum-indonesia/#:~:text=Apabila%20bukan%20peraturan%20perundang%20undangan,bebas%20atau%20diskresi%20dari%20Pemerintah.> diakses pada tanggal 14 Desember 2015
- Rio Trifo Inggiz, Toto Kushartono, Aliesa Amanita, 2019, Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Prundang-Undangan, Jurnal Dialektika Hukum, Vol.1 No.1 Tahun 2019, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3529762&val=30885&title=KEDUDUKAN%20SURAT%20EDARAN%20DIKAITKAN%20DENGAN%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%2015%20TAHUN%202019%20JUNCTO%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%2012%20TAHUN%202011%20TENTANG%20PEMBENTUKAN%20PERATURAN%20PERUNDANG-UNDANGAN#:~:text=Surat%20Edaran%20merupakan%20peraturan%20kebijaksanaan,yaitu%20untuk%20kepentingan%20pemerintah%20dengan> diakses pada 14 Desember 2025

D. Internet

Humas Kanwil Kemenkumham DIY-Jogja Pati Istimewa, “Ditjen AHU Selenggarakan Koordinasi Ujian CAT Calon Notaris dan Penanganan Kasus Akun”. <https://jogja.kemenkum.go.id/berita-utama/ditjen-ahu-selenggarakan-koordinasi-ujian-cat-calon-Notaris-dan-penanganan-kasus-akun> (diakses pada tanggal 10 Februari 2025)

Humas AHU, “Dirjen AHU Tegaskan Pentingnya Profesionalisme dan Digitalisasi Profesi Notaris di Era Disrupsi” <https://pwebinarortal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/5694-dirjen-ahu-tegaskan-pentingnya-profesionalisme-dan-digitalisasi-profesi-Notaris-di-era-disrupsi> diakses pada tanggal 28 Juli 2025

Tria Sutrisna Novianti Setuningsih, “Menteri Hukum Akan Tertibkan Notaris Yang Saling Berbagi Akun”, <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/17/14003311/menteri-hukum-akan-tertibkan-Notaris-yang-saling-berbagi-akun?>, diakses pada tanggal 30 Juli 2025

Tindak Pidana dalam Peretasan (*Hacking*) dan Keamanan Siber di Era Digital, <https://sahabathukumkita.com/tindak-pidana-dalam-peretasan-hacking-dan-keamanan-siber-di-era-digital/#:~:text=Pengertian%20Peretasan,malware%2C%20hingga%20brute%20force%20attacks>, diakses pada tanggal 5 November 2025

<https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>

Constantinus Kristomo, Slide PPT ke 4-5, Dalam Acara Webinar “Dibalik Menjamurnya Biro Jasa Kenotariatan”, <https://www.youtube.com/watch?v=wSkAwwfs02Zw>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2024

Hukum Online, Perbuatan Melawan Hukum Tidak Bisa Diwariskan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbuatan-melawan-hukum-tidak-bisa-diwariskan-ho118690/?page=all>, diakses pada tanggal 22 Januari 2026

E. Skripsi Tesis dan atau Disertasi

Nurullia, Syafira , “Perlindungan Hukum Notaris yang Beritikad Baik Terhadap Tindakan Penyalahgunaan Akun AHU *Online* oleh Pihak Tidak Berwenang”, Tesis, Universitas Indonesia, 2025.

Iswar Danianto, “Peran Notaris Dalam Pendirian Dan Pendaftaran Perseroan Terbatas Pasca Belakunya Sistem Baru AHU Online Dan Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko”, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2022

Christian Naldo, Rony Andre ,”Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Terhadap Kerugian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kebakaran Lahan Perkebunan di Pulau Sumatera)”, Disertasi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2021

Joni Rianto, “Kebijakan Pemblokiran Dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Konten Media Elektronik”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016